

RESPON STAKEHOLDER TERHADAP KERUSAKAN HUTAN DI DESA TIRTANAGAYA KECAMATAN BOLANO LAMBUNU KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Moh Sukri¹⁾, Golar²⁾, Sudirman Dg. Massiri²⁾

Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako
Jl. Soekarno-Hatta Km. 9 Palu, Sulawesi Tengah 94118

¹⁾Mahasiswa Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako

Korespondensi : Sukri3mohammad@gmail.com

²⁾Staf Pengajaran Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako

ABSTRAK

Environmental degradation as indicated by the depletion of resources and the destruction of natural habitats is the impact of human-nature relationship. Furthermore, forest fires, illegal logging, gold mining and other related activities are forms of forest destruction that can be claimed to be more intense lately. Therefore, an initial measure should be carried out including identifying stakeholders' responses toward the issues and assessment on the level of destruction. This study aims to examine stakeholders' responses toward forest destruction in Tirtanagaya Village, Bolano Lambunu Sub-district, Parigi Moutong Regency. The techniques of data collection were observation and in-depth interview. Several key informants were selected for the interview in order to investigate their responses toward forest destruction in the study site. It used qualitative descriptive method for data analysis. In overall, the finding indicates that the responses of stakeholders in relation with forest destruction issues are relatively poor. It is evidenced by their low participation and lack of real actions to promote forest preservation. It will have a detrimental impact on the joint effort for overcoming the problems of forest destruction in Tirtanagaya Village.

Key Words : Environmental degradation, Response, Stakeholders.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati, yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (UUD No. 41 Tahun 1999). Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber daya air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Lebih dari 1400-an Desa di Sulawesi Tengah terletak di sekitar hutan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pengelolaan hutan tidak dapat di pisahkan dari dinamika perdesaan dan masyarakat, (Saleh. 2007).

Kerusakan hutan yang meliputi kebakaran hutan, penebangan liar dan lainnya merupakan salah satu bentuk gangguan yang makin sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kerusakan hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asap dari kebakaran hutan mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara.

Kabupaten Parigi Moutong terletak kurang lebih 66 kilometer dari Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Parigi Moutong memiliki total luas wilayah 6.231,85 km² dengan total kawasan areal hutan seluas 603.537 Ha, terdiri dari hutan lindung 148.690 Ha, hutan produksi tetap 21.805 Ha, hutan produksi terbatas 110.008,09 Ha, hutan yang

dapat di konversi 22.808 Ha, Kawasan suaka alam dan pelestarian alam 56.431,57 Ha. (Data Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah).

Masyarakat sekitar hutan menjadi penentu kelestarian hutan. Hal yang sama juga berlaku bagi masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong terutama di Desa Tirtanagaya Kecamatan Bolano Lambunu. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa perilaku masyarakat sangat tidak terkendali yaitu dengan melakukan penambangan emas, penebangan pohon dan pembukaan lahan pertanian sehingga memicu kerusakan hutan di sekitar wilayah Desa Tirtanagaya Sering kali terjadi penambangan emas, penebangan pohon dan pembukaan lahan pertanian di hutan yang dilakukan oleh warga untuk berbagai hal. Masyarakat menyadari bahwa perilaku merusak hutan merupakan pelanggaran terhadap hukum, tetapi masyarakat terdesak oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan kebutuhan perumahan.

Kelangsungan hidup manusia selalu tergantung pada lingkungan hidupnya, Manusia mendapatkan unsur-unsurnya yang diperlukan dalam hidupnya dan lingkungannya. Makin tinggi kebudayaan manusia, makin beranekaragam kebutuhannya. Makin besar jumlah kebutuhan hidupnya dari lingkungan, maka makin besar pengaruh manusia terhadap lingkungan, (Supardi, 1994).

Desa Tirtanagaya merupakan salah satu desa di wilayah Parigi Moutong yang sebagai besar masyarakat mengelola dan mengkonversi hutan untuk diolah dan ditanami tanaman perkebunan (jenis kakao maupun cengkeh). Aktivitas ini terus berlangsung hingga saat ini. Kondisi ini bila tidak ditangani akan berdampak terhadap kerusakan hutan

Masalah kerusakan hutan yang timbul di Desa Tirtanagaya bukan hanya karena faktor masyarakat tetapi ada pihak-pihak lain terkait dalam perusakan hutan sehingga dibutuhkan peran stakeholder untuk mengatasi kerusakan hutan, Ketidakpedulian akan kerusakan hutan akan menghasilkan kerusakan hutan yang lebih besar.

Rumusan Masalah

Aktifitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti rusaknya ekosistem hutan dan menurunnya keanekaragaman hayati. Sumber daya hutan di Desa Tirtanagaya dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari.

Berbagai upaya pencegahan dan perlindungan kerusakan hutan dilakukan termasuk mengefektifkan hukum (Undang-undang, PP, dan Sk Menteri), namun belum memberikan hasil yang optimal. Penebangan liar, pembukaan lahan pertanian dan penambangan illegal dapat berdampak negatif antara lain tanah longsor dan banjir. Oleh karena itu peran stakeholder sangatlah penting untuk mencari solusi bersama terlibat masalah tersebut.

Terkait hal tersebut, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi bagaimana tanggapan dan penilaian stakeholder terhadap kerusakan hutan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana respon stakeholder terhadap kerusakan hutan di Desa Tirtanagaya Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong.

Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon stakeholder terhadap Kerusakan hutan di Desa Tirtanagaya. Sedangkan Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai masukan untuk perbaikan respon terhadap kerusakan hutan dan menjadi bahan informasi bagi pihak terkait dan masyarakat pada umumnya.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan di Desa Tirtanagaya Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong selama Tiga bulan dari Bulan Desember Sampai Bulan Februari 2017.

Alat dan Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner (panduan pertanyaan) daftar

panduan wawancara. Sedangkan alat yang digunakan yaitu alat tulis menulis, recorder, kamera, panduan wawancara, dan Kuisisioner.

Metode Penelitian

Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini yang diwawancarai sebanyak 15 (Lima belas) orang. Untuk lebih jelasnya secara rinci disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 1. Narasumber penelitian.

No	Stakeholder	Ket
1	Dinas kehutanan Provinsi Sulteng	1 Orang
2	Kepala Desa Tirtanagaya	1 Orang
3	Tokoh masyarakat	2 Orang
4	Masyarakat	10 Orang
5.	LSM	1 Orang

Sumber : Data Narasumber penelitian 2017

Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data penelitian dilakukan dengan metode observasi dan wawancara, langsung di lokasi penelitian kepada beberapa narasumber yang telah disebutkan di atas.

Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang gejala-gejala yang diamati (Hadi, 1997). Dalam penelitian ini dilakukan observasi langsung (*direct observation*) dan peneliti menempatkan diri sebagai pengamat (*recognized outsider*) sehingga interaksi peneliti dengan subjek peneliti bersifat terbatas. Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa yang dilihat dan menggali dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran yang utuh tentang objek yang diteliti. Objek yang diamati adalah kehidupan masyarakat dalam keseharian misalnya pergaulan dan komunikasi di antara mereka, aktifitas dalam pemenuhan kebutuhan hidup, dan keadaan lingkungan fisik desa meliputi jalan, rumah dan bangunan serta fungsinya.

Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara secara tidak terstruktur (*unstructured interviews*) terhadap masyarakat, tokoh masyarakat, aparat pemerintah yang terkait langsung dengan kerusakan hutan Juga terhadap tokoh kunci (*key informan*) dan

wawancara informal (*informal interviews*). Wawancara dengan tokoh kunci dilakukan untuk menggali respon stakeholder terhadap kerusakan hutan di Desa Tirtanagaya secara mendalam karena tokoh tersebut mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang topik penelitian. Tokoh kunci bisa Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Desa dan aparat Desa.

Narasumber di bagian masyarakat adalah aparat Desa, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat itu sendiri yang sehari-harinya bekerja dan memanfaatkan hutan. Sedangkan narasumber dari aparat Pemda adalah, aparat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, aparat Desa di tempat lokasi penelitian.

Analisis Data

Analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Metode ini memberikan gambaran hubungan-hubungan logis untuk menerapkan suatu fenomena sosial (Singarimbun, 1995). Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Maleong, 1997). Selanjutnya data-data tersebut diuraikan dengan cara menghubungkan-hubungkan informasi hasil pengamatan dan teori yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Hutan Desa Tirtanagaya

Potensi flora dan fauna yang terkandung dalam hutan di Desa Tirtanagaya sangat beraneka ragam, baik jenis maupun bentuknya dengan berbagai tipe ekosistem tempat penyebarannya. Meskipun demikian kondisi hutan di Desa Tirtanagaya saat ini memprihatinkan dan dalam keadaan yang kritis, karena terus mengalami penyusutan setiap tahunnya dikarenakan adanya pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan, penebangan liar atau *illegal logging*.

Pada pertengahan tahun 2012 terjadi aktifitas penambangan emas besar-besaran disekitar Desa Tirtanagaya yang dilakukan oleh PT. Matoa ujung yang saat itu PT Matoa ujung tidak memiliki dokumen Analisis mengenai dampak

lingkungan (AMDAL). Akibat aktifitas tambang ini, petani Bolano Lambunu banyak mengalami kerugian diperkirakan jika sebelumnya petani wilayah tersebut bisa menghasilkan padi lebih dari 3 ton/hektar, kini hanya bisa menghasilkan padi 1,8 ton/hektar. Penambangan emas telah menimbulkan kerusakan hutan dan lingkungan yang sangat luar biasa, dan sudah terbukti dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya itu, ahli fungsi hutan menjadi perkebunan semakin merajalela serta ditambah lagi masalah yang sudah lama menyita pemikiran pemerintah dan berbagai kalangan di daerah maupun di lembaga swadaya masyarakat mengenai penebangan liar kawasan hutan, menimbulkan bermacam-macam dampak yang sangat serius.

Rusaknya hutan di sekitar Desa Tirtanagaya diduga disebabkan aktifitas pertambangan dan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan. Alih fungsi hutan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tirtanagaya disebabkan kurangnya lahan usaha masyarakat sekitar hutan, okupasi yang dilakukan lebih kepada kepentingan individu akibat keterdesakan sempitnya usaha masyarakat sekitar hutan. Masyarakat yang melakukan alih fungsi hutan sebanyak 29 KK dan luas lahan yang dialih fungsikan rata-rata memiliki luas lahan kurang lebih 1,5 hektar perorang.

Masyarakat memanfaatkan lahan tersebut dengan cara ditanami dengan tanaman perkebunan seperti kakao dan cengkeh, masyarakat yang mengalih fungsikan lahan masih mengandalkan komoditi tanaman kakao dan cengkeh karena masyarakat menganggap tanaman tersebut cukup menguntungkan bagi penghasilan masyarakat.

Respon Stakeholder Terhadap Kerusakan Hutan di Desa Tirtanagaya

1. Respon Dinas Kehutanan Provinsi

Dalam konteks pelestarian hutan diperlukan kepedulian berbagai pihak yang terkait untuk duduk bersama dan mempertimbangkan nasib masa depan hutan, karena permasalahan utama dari kerusakan hutan di Desa Tirtanagaya sangat kompleks dengan rincian sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan di Desa Tirtanagaya bagi kehidupan sehari-hari.
2. Lemahnya regulasi aparat yang mengawalinya dengan kata lain hutan menjadi objek yang dapat diperjualbelikan dengan mudah tanpa menghiraukan prosedur perlindungan hutan, keseluruhan permasalahan yang ada melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses kerusakan hutan yang ada di Desa Tirtanagaya.

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai peran yang penting dalam pelestarian hutan yang ada di Desa Tirtanagaya, seperti merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan mengembangkan peran serta masyarakat. Kebijakan yang diambil tidak hanya menghitung keuntungan ekonomi sesaat, tapi juga harus memperhitungkan kepentingan sosial dan lingkungan.

Bila menghitung kerugian yang akan diderita akibat tidak memperhitungkan aspek sosial dan lingkungan, kadang-kadang keuntungan ekonomi yang akan diperoleh tidak sebanding dengan kerugian yang akan diderita. Kebijakan yang ada selama ini, selalu bersifat *Top Down* tanpa melibatkan masyarakat setempat. Sehingga seringkali kebijakan yang ada bukanlah hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya setelah program tersebut selesai, masyarakat juga tidak tau fungsi dan manfaat serta keuntungannya. Oleh karena itu kebijakan saat ini harus dibalik menjadi *Bottom up*, yaitu dengan melibatkan masyarakat dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan. Dengan sistem ini diharapkan program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan atau dengan kondisi masyarakat. Tentu dengan melibatkan masyarakat, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap program pemerintah.

Menurut Golar (2014) melibatkan masyarakat secara partisipatif (*bottom up*) memiliki beberapa keuntungan:

1. Data dikumpulkan, dikaji dan dicoba secara langsung oleh masyarakat.

2. Pemecahan masalah langsung dapat dicoba selama berlangsungnya proses.

Perlu usaha keras dan sungguh-sungguh dari semua pihak untuk melakukan pelestarian hutan di sekitar Desa tirtanagaya, Namun hingga saat ini Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah tidak merespon dengan baik terkait adanya kerusakan hutan yang terjadi di Desa Tirtanagaya dikarenakan minimnya atau kurangnya informasi dan sumber daya yang terkait.

2. Respon Kepala Desa Tirtanagaya

Secara fungsional dan struktural tanggung jawab serta peran kepala Desa dalam pengelolaan hutan hanya dapat mendukung kebijakan dan pelaksanaan pihak pemerintah. Menurut informasi yang diperoleh dari kepala Desa, penyebab kerusakan hutan terjadi akibat dari kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar hutan. Namun ada tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh kepala desa yaitu pencegahan dengan cara pelarangan penambangan emas dan penebangan pohon. Sebenarnya masyarakat sudah menyadari bahwa dampak dari kerusakan hutan tersebut. seperti banjir, menurunnya hasil panen padi yang merugikan masyarakat lain tetapi sebagian juga masyarakat yang lebih memikirkan kebutuhan ekonomi dari pada lingkungannya. Arif (1995) menjelaskan bahwa tindakan atau tingkah laku adalah kebiasaan bertindak yang menunjukkan tabiat seseorang yang terdiri dari pola-pola tingkah laku yang digunakan oleh individu dalam melakukan kegiatan. Lebih jauh dikatakan bahwa tindakan itu terjadi karena adanya penyebab (*stimulasi*), motivasi, dan tujuan dari tindakan itu. Membangun kesadaran masyarakat memang tidak segampang membalikkan telapak tangan. Perlu kerja sama dari semua pihak baik masyarakat, pemerintah maupun perusahaan.

Faktor internal yang mempengaruhi perilaku adalah latar belakang pengalaman individu, motivasi, status kepribadian, dan sebagainya. Perilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek atau stimulasi yang yang dihadapinya, berkaitan erat dengan kepercayaan dan perasaan terhadap objek tersebut. Dalam teori perilaku terencana, faktor

yang mempengaruhi perilaku adalah keyakinan akan sesuatu hal, norma-norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dihayati (Azwar 2010).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi terhadap stimulasi lingkungan sosial. Perilaku merupakan fungsi dari karakteristik individu, meliputi berbagai variabel seperti motif, nilai-nilai, sifat kepribadian, dan sikap yang saling berinteraksi satu sama lain yang berinteraksi dengan faktor-faktor lingkungan.

3. Respon Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan dalam desa tersebut. Meskipun tokoh masyarakat hanya berperan sebagai motor penggerak tetapi mereka memikirkan pentingnya akan kelestarian hutan bagi kehidupan sehari-hari. Namun sampai saat ini tokoh masyarakat Desa Tirtanagaya kurang merespon terhadap kerusakan hutan dikarenakan kurangnya wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap kelestarian hutan yang ada di Desa tirtanagaya. kerusakan hutan terjadi akibat kurangnya tanggapan dari pemerintah kami sebagai tokoh masyarakat kurang mengetahui bagaimana pedulinya pemerintah terhadap koordinasi dan kondisi hutan yang ada di sekitar kita. koordinasi dan sosialisasi pemerintah dalam melakukan tindakan yang melibatkan tokoh masyarakat atau masyarakat sangat kurang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa masyarakat khususnya yang biasa bekerja di hutan (penebangan liar) dan penambangan emas kurang diajak memecahkan jalan keluar bagaimana, merubah cara kerja mereka supaya pendapatan ekonomi tetap bisa meningkat tanpa harus mencuri kayu.

4. Respon Masyarakat

Dalam setiap kegiatan yang berdampak besar terhadap hutan hendaknya masyarakat sangat menentukan apakah perlindungan dan pengelolaan hutan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Memberikan peran dan tanggung jawab berarti memberikan kepercayaan dan keyakinan bahwa keberlangsungan hidup akan sangat bergantung pada masyarakat, semakin besar tanggung jawab maka semakin besar kontrol yang dilakukan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam melakukan pelestarian tanpa peran serta dan dukungan masyarakat maka kelestarian hutan tidak dapat dikendalikan (Golar *et al* 2017). Menurut informasi yang diperoleh dari masyarakat, hutan yang ada disekitar Desa Tirtanagaya sangatlah memprihatinkan, rusaknya hutan akibat penebangan liar dan penambangan emas tidak hanya masyarakat yang melakukannya tetapi ada juga kalangan petugas. lebih lanjut dijelaskan, kebanyakan penduduk di sekitar kawasan hutan bekerja sebagai perambah hutan. Hal ini menguatkan bahwa motivasi masyarakat yang merambah di kawasan hutan di Desa Tirtanagaya adalah ingin mendapatkan klaim lahan atau penguasaan lahan dengan menandai lahan dengan tanaman yang menunjukkan bahwa lahan itu milik mereka. Masyarakat yang merambah bukan hanya untuk dijadikan lahan perkebunan melainkan mereka perjual belikan kepada masyarakat baru yang membutuhkan lahan.

Masyarakat juga menegaskan bahwa, masyarakat banyak terlibat dalam perusakan hutan Karena faktor ekonomi dan sosialisasinya yang kurang sehingga melanggar larangan menebang kayu maupun melakukan penambangan didalam kawasan hutan apalagi memasuki kawasan tanpa izin. Berdasarkan informasi pendekatan dan wawancara kepada masyarakat di lokasi sekitar kawasan hutan, para narasumber berpendapat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kurang dapat mensosialisasikan pentingnya aturan akan kebijakan larangan tersebut.

Pemahaman tingginya nilai hasil hutan ini mendorong adanya pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat melalui sumber daya hutan. Keadaan ini semakin kondusif dengan tidak terbentuknya atau terciptanya pemenuhan ekonomi masyarakat melalui usaha-usaha ekonomi lain yang tidak memanfaatkan hasil hutan. Hal ini ditegaskan oleh seorang masyarakat yang menyatakan “Sebenarnya masyarakat tahu dengan adanya larangan, merusak hutan, tapi karena kebutuhan ekonomi, selain kebutuhan ekonomi sebab lainnya adalah karena sumber daya mereka rendah jadi sulit untuk memahami larangan dari pemerintah dan

himbauan. Di lain pihak karena mereka juga tidak ada lagi alternatif pekerjaan yang bisa mereka lakukan. Mereka menggarap hutan karena hasilnya cukup banyak dengan modal sedikit” fenomena ini menunjukkan adanya ketergantungan hidup (ekonomi) masyarakat terhadap hasil hutan yang besar.

5. Respon LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Lembaga swadaya masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Organisasi tersebut bukan menjadi bagian pemerintah, birokrasi ataupun negara. Namun peran dari lembaga swadaya masyarakat ini diperlukan untuk mendorong atau menggerakkan masyarakat.

Lembaga swadaya masyarakat yang ada di Desa Tirtanagaya saat ini kurang berpartisipasi dikarenakan lembaga swadaya masyarakat yang ada di Desa Tirtanagaya saat ini sedang fakum dan tidak lagi beroperasi sebagai mana mestinya lembaga swadaya masyarakat biasanya. Namun ada salah seorang anggota LSM menyayangkan bahwa kurangnya partisipasi dari lembaga swadaya masyarakat terhadap lingkungan membuat kondisi hutan yang ada di sekitar Desa Tirtanagaya kurang terjaga dan di tambah dengan aktifitas masyarakat yang sibuk, tidak terkendali merambah hutan dengan tidak memikirkan dampaknya hanya akan membuat permasalahan yang begitu besar namun beliau menyadari bahwa penyelesaian masalah tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab komponen masyarakat keseluruhan.

Secara keseluruhan respon stakeholder ditunjukkan bahwa kepedulian stakeholder terhadap kerusakan hutan kurang baik, hal ini disebabkan minimnya informasi dan kurangnya tindakan-tindakan nyata terhadap upaya pelestarian hutan. meskipun demikian hal ini juga perlu diperkuat dengan dorongan, motivasi atau hubungan dengan lingkungan sehingga dapat menggerakkan stakeholder untuk memanfaatkan sumberdaya hutan.

Kelestarian hutan sangat bergantung pada peran stakeholder, untuk menjaga kelestarian hutan. Perilaku yang peduli terhadap kelestarian hutan dapat dilakukan dengan tidak melakukan penebangan pohon di hutan, tidak melakukan pembukaan areal perkebunan didalam hutan dan turut mengawasi perilaku masyarakat yang melakukan perusakan hutan.

Kegiatan penebangan dan tambang secara liar telah menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek, sumberdaya hutan yang sudah hancur selama masa orde baru kian menjadi rusak akibat maraknya penebangan dalam jumlah yang sangat besar. Kerugian akibat penebangan dan penambangan liar memiliki dimensi yang luas tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah sosial, budaya, politik dan lingkungan Sadino, (2011).

Menurut Suhendang (2002) kondisi hutan yang baik akan berdampak terhadap sumber-sumber manfaat yang berkelanjutan seperti sumber kayu dan sumber air yang dimanfaatkan oleh masyarakat baik yang berada didalam hutan, sekitar kawasan hutan maupun masyarakat yang jauh dari kawasan hutan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Penelitian ini sejalan dengan pendapat Juhadi (2007) menyatakan bahwa hubungan antara manusia dengan lingkungan alamnya tidaklah semata-mata terwujud sebagai suatu hubungan ketergantungan manusia terhadap lingkungannya, tetapi juga terwujud sebagai suatu hubungan dimana manusia mempengaruhi dan merubah lingkungannya. Sadino (2011) menjelaskan bahwa masyarakat sekitar hutan kehidupannya sangat bergantung pada keberadaan hutan.

Perusakan hutan sudah kerap kali terjadi dan benar-benar membawa dampak buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu kita cegah untuk menghindari terjadinya berbagai dampak buruk. Kepedulian merupakan wujud nyata dari empati dan perhatian Boyatzis dan Mc Kee (2005).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa respon stakeholder secara keseluruhan dinilai kurang baik hal ini dibuktikan dengan rendahnya partisipasi dan kurangnya tindakan-tindakan nyata terhadap upaya pelestarian hutan. Hal ini akan berdampak pada sulitnya untuk melakukan kolaborasi dalam mengatasi masalah kerusakan hutan yang ada di Desa Tirtanagaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. C, 1987. Responsi hukum acara perdata. Armico, Bandung.
- Arif M, 1995. *Materi Pokok Organisasi Dan Manajemen*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Azwar, S. 2010. *Sikap Manusia dan Pengukurannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Boyatzis, Ricard & Annie Mc Kee 2005, *Resonant Leadership: Memperbarui Diri Anda dan Berhubungan dengan Orang Lain Melalui Kesadaran, Harapan, dan Kepedulian*, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Dinas kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah http://dishut.sulteng.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=76:lahan-kritis-626000-hektar-sulteng-kritis-&catid=42:rehabilitasi-lahan-a-perhutan-sosial&Itemid=91.
- Golar, Akbar, Husain Umar, Imran Racman, Andi Sahri Alam, Elhayat Labiro,. 2017. *The Poverty Assessment Based On Subjective Criteria: Case Study Of Rural Community Near Protected Forest In Central Sulawesi*. Australian Journal Of Basic And Applied Sciences.
- Golar, 2014. Resolusi Konflik dan Pemberdayaan Komunitas Peladang Di Tnll Prosiding Seminar Nasional Reaktualisasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Makasar.
- Hadi. S,. 1997. *Metode research*. Yogyakarta: yayasan Penerbit Fakultas Fisiologi UGM.
- Juhadi, 2007. *Pola-pola Pemanfaatan lahan dan Degradasi Lingkungan pada Kawasan*

- Perbukitan*. Semarang : Fakultas Ilmu Sosial UNNES.
- Maleong, L. J, 1997. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung
- Saleh, R, 2007. Hutan dan Manusia. Karsa SGP PTF UNDP-EC-SEAMEO SEARCA, Yogyakarta.
- Setiadi, S, 2012. Kerusakan hutan. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sadino, 2011. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar Hutan (illegal logging)*. Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta.
- Singarimbun. M, 1995. *Metode penelitian survei LP3S*, Jakarta.
- Suhendang, Endang. 2002, *Pengantar Ilmu Kehutanan*. Fakultas Kehutanan, Bogor.
- Supardi. I, 1994. Pembangunan yang Memanfaatkan Sumber Daya. PT. Rineka cipta, Jakarta.